

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan manusia. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, terbuka, mandiri, dan demokratis. Pendidikan Nasional harus mampu mempersiapkan *output* di bidang pendidikan dalam memasuki era global. Sementara pendidikan selama ini masih menggunakan standart nilai raport sebagai standart baku. Anaknya berhasil manakala raportnya tidak ada yang merah, secara kelembagaan sekolah belum mampu menyediakan stok seperti apa yang diharapkan.

Berdasarkan realita kebutuhan masyarakat, pendidikan harus mampu mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan dan sikap). Sedangkan, hasil belajar dapat ditandai oleh tiga ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. Berkenaan dengan hal tersebut, kualitas pendidikan dapat dihasilkan apabila guru mempunyai kompetensi yang profesional. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya¹. Kesadaran tentang

¹ Farida Sarimaya. 2008. *Sertifikasi Guru, Apa, Mengapa dan Bagaimana?*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.h. 17

pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan lebih baik di masa mendatang telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewakan serta merubah perilaku serta meningkatkan kualitasnya menjadi baik. Sedangkan Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat dimana proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis.

Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid. Melainkan berada dalam suatu sistem yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sekolah dipandang sebagai suatu organisasi. Sekolah mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan masyarakat.²

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Setiap saat pendidikan akan selalu menjadi perhatian dan bahkan tak jarang sasarankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Otonomi Pemerintah Daerah dinyatakan dalam Bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

² Nur Cholis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori-teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 20

pemerintah daerah dan DPRD atas asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, demikian juga dalam pasal 2 dinyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.³ Keinginan pemerintah yang dituangkan dalam haluan negara agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada arah desentralisasi dan otonomi menuntut partisipasi masyarakat secara aktif sebagai konsekuensi logis atas diberlakukannya otonomi daerah.

Oleh karena itu diperlukan kesiapan sekolah, termasuk juga Sekolah Menengah Pertama yang menjadi ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan pada garis bawah. Pendidikan yang selama ini dikelola secara terpusat (*sentralisasi*) harus diubah guna mengikuti irama yang sedang berkembang di mana otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai sistem pendidikan nasional.⁴ Dapat dilihat bahwa negara ini masih dapat bangun dan berkembang menjadi negara besar dengan sumber daya manusia dan humanisme yang tinggi bila sekolah/madrasah diberdayakan, ditingkatkan mutunya dan diubah sistem pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kebutuhan (*demand approach*) melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

³ UU RI No 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah , Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Bandung : Muansa Aulia, 2006), h.14-16

⁴ E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), Cet. I, h. 4

Otonomi sistem dan pengelolaan pendidikan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukannya memindahkan atau mengabaikan masalah pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Momentum seperti ini jika tidak di sikapi dengan segera akan membuat dunia pendidikan ketinggalan dan terkesan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, bahkan akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hal ini dihadirkanlah salah satu pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara mandiri yang diharapkan mampu mengangkat sekolah dari keterpurukannya dan dapat memecahkan berbagai persoalan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan kita, inilah yang dikenal dengan istilah “Manajemen Berbasis Sekolah”⁵

Dorongan untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul tidak saja berasal dari adanya kebutuhan subyektif untuk makin meningkatkan mutu pendidikan Islam yang diselenggarakan, tetapi juga oleh adanya tuntutan perkembangan masa depan masyarakat kita dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan bermoral.⁶ Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, dirasakan perlunya revitalisasi hubungan sekolah dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Hal ini penting karena sekolah memerlukan

⁵ *Ibid.*, h.11

⁶ Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam*, (Solo: CV.Ramadhani, 1991), h. 9

masuk dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan yang relevan. Jalinan semacam itu dapat terjadi jika kepala sekolah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).

Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah. Untuk kepentingan tersebut, dapat dilakukan berbagai teknik dan media seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat-menyurat, buku penghubung, buletin sekolah dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua.⁷ Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diungkapkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.⁸

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil

⁷ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: cet. II, 2005), h. 66

⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (UU RI No. 20 th. 2003), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.28

siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, yang mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk: Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah, Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya, dan Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak.

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam, Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak, Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran, Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah, Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan hambatan yang dihadapi sekolah, Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan

sekolah, Mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah.⁹

Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, termasuk pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan fasilitas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.¹⁰

Konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, maka dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkan yang diberi nama Komite sekolah yang merupakan lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada

⁹ Depdiknas. 2001. Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Depdikbud. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. h. 19-20

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen – Depdiknas, 2002), h.2

tingkat satuan pendidikan sekolah. Dan akan terasa sukar berjalan jika hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, siswa dan masyarakat tidak optimal.

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang harus dijalankan komite adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Lembaga Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Lembaga Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Lembaga Mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Selain hal tersebut diatas, komite sekolah sebagai lembaga yang ikut serta dalam peningkatan mutu pendidikan. Pembentukan komite sekolah diharapkan dapat memacu usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, selaras dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah. Pada tingkat sekolah upaya

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menuntut partisipasi yang lebih besar dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan badan atau kelompok lain yang mewakili berbagai aspirasi pada komunitas setempat dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan.

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan, proses yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Berdasarkan observasi penulis di SMPN 15 Bandar Lampung, peran komite sekolah selama ini kurang berarti, karena keterlibatan komite dalam proses pendidikan kurang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah dan masyarakat disatuan pendidikan, maka kondisi yang terlihat disekolah ini semua peran tersebut belum maksimal bahkan sangat rendah. Keberadaan komite sekolah hanya sekedar formalitas saja. Akan tetapi dari sisi penampilan (secara fisik) sekolah ini cukup maju. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah siswa dari tahun ke tahun, dan prestasi akademik dan non akademik yang cukup baik. Dan menurut Bpk. Drs.

Sumardi, prestasi akademik dan non akademik SMPN 15 Bandar Lampung cukup baik, dapat dilihat dari :

1. Nilai hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional di atas rata-rata standar minimal dengan tingkat kelulusan dapat mencapai 100 %.
2. Banyak lulusan yang berhasil masuk SMA Negeri di kota Bandar Lampung.
3. Kegiatan ekstrakurikuler dalam berbagai bidang berjalan dengan baik, seperti olahraga, pramuka, PMR dan lain-lain.
4. Mengikuti berbagai lomba dan berhasil meraih juara dalam berbagai bidang seperti :
 - a. Bidang kerohanian Islam, misal Lomba Da'iah, Pidato Pentas PAI, baca Al'Quran, Tilawatil serta Lomba Pidato Bahasa Inggris.
 - b. Bidang Kesehatan, Lomba PMR.
 - c. Bidang Pramuka, seperti berbagai kegiatan pramuka.
 - d. Bidang Olahraga, pernah menjuari lomba futsal.¹¹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa prestasi-prestasi tersebut tercapai tanpa adanya peran komite sekolah. Pihak sekolah tidak pernah melibatkan komite sekolah untuk berbagai kegiatan diatas, maupun dalam upaya pencapaian tingkat kelulusan 100 %.

Menurut Rahmat Rifan, orang tua siswa dari M. Haris fadly kelas VIII E, keterangan tersebut diatas ada benarnya. Karena secara operasional Komite Sekolah tidak terlibat langsung, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini komite sekolah mengetahuinya setelah memperoleh laporan dari Kepala Sekolah dalam rapat tahunan, yang hanya

¹¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Drs. Sumardi, Waka Kurikulum, dilakukan di sekolah pada tanggal 24 Agustus 2017, pukul 08.00 – 09.00 WIB.

diadakan hanya satu kali setahun, yakni pada awal tahun ajaran baru. Itupun terjadi ketika sekolah menerima dana bantuan dari masyarakat, dan semenjak sekolah tidak lagi memungut dana dari masyarakat, hampir kegiatan rapatpun sudah jarang sekali diadakan.¹²

Menurut Ibu Dian Rihati, Komite sekolah harusnya dilibatkan dalam hal-hal yang terkait dengan keuangan sekolah dan pembangunan sekolah, apalagi jika melibatkan dana bantuan seperti dana BOS. Perencanaan penggunaan dana harusnya dimusyawarahkan dulu dengan orang tua murid, khususnya dengan komite sekolah. Tetapi selama ini yang terjadi adalah komite hanya sekedar mendapat laporan atau pemberitahuan saja tentang hal-hal yang terkait diatas.¹³

Menurut Ibu Dra. Sri Murni, walaupun fasilitas belajar mengajar serta buku pendukung pembelajaran telah cukup lengkap, tetapi ternyata peran kontrol orang tua sangat kurang, ini terbukti pada setiap tugas yang harus dilanjutkan dirumah tidak sedikit diantara siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.¹⁴

Demikian pula halnya dengan tenaga guru dan staf, walaupun posisi jabatan guru dan staf sudah terisi, dan sebagian guru juga sudah berijazah S1, tetapi ternyata dilihat dari latar belakang pendidikan mereka juga masih ada yang tidak sesuai. Sebenarnya hal ini dapat saja diatasi manakala komite sekolah turut dilibatkan untuk mengatasinya.¹⁵

Berdasarkan berbagai uraian diatas dapat dikatakan bahwa peran komite di SMPN 15 Bandar Lampung dalam pendidikan sangat kurang sekali, seharusnya komite lebih berperan aktif dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada disekolah tersebut baik itu akademik, non akademik maupun fasilitas sekolah yang merupakan penunjang dalam pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang peran komite sekolah dalam pendidikan di SMP Negeri 15 Bandar Lampung.

¹² Hasil wawancara dengan Bpk. Rahmat Rifan, Orang Tua dari M. Haris Fadly, dilakukan di kediamannya pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 14.00 – 14.30 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Rihati, Bendahara Komite, dilakukan di sekolah pada tanggal 31 Agustus 2017, pukul 10.10 – 10.45 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dra, Sri Murni, Guru Bidang Studi Matematika, dilakukan di sekolah pada tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.10 – 10.35 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Kun Winarsih, S.Sos, Kasubbag TU, dilakukan di sekolah pada tanggal 30 Agustus 2017, pukul 12.10 – 12.45 WIB.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui bahwa fokus penelitian dari penelitian ini adalah : ***“Peran Komite Dalam Pendidikan Di SMP Negeri 15 Bandar Lampung”***.

Sedangkan Subfokus dalam penelitian ini, peran komite sekolah merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam memberi pertimbangan (*advisory agency*) di SMP Negeri 15 Bandar Lampung?
2. Bagaimana peran komite sekolah dalam memberi dukungan (*supporting agency*) di SMP Negeri 15 Bandar Lampung ?
3. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*)

di SMP Negeri 15 Bandar Lampung ?

4. Bagaimana peran komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dengan masyarakat di SMP Negeri 15 Bandar Lampung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran komite sekolah dalam memberi pertimbangan (*advisory agency*) di SMP Negeri 15 Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui peran komite sekolah dalam memberi dukungan (*supporting agency*) di SMP Negeri 15 Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) di SMP Negeri 15 Bandar Lampung
4. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dengan masyarakat di SMP Negeri 15 Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 15 Bandar Lampung.

2. Secara praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Peneliti mendapatkan pengalaman didalam mengkaji peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi semua pihak terutama bagi pihak sekolah itu sendiri dan juga bagi komite sekolahnya.

